PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN WISATA HUTAN REPONG DAMAR PAHMUNGAN
(Studi Di Kabupaten Pesisir Barat)

Skripsi

Oleh

HERNANDO

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021

ABSTRAK

PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN WISATA HUTAN REPONG DAMAR PAHMUNGAN
(Studi Di Kabupaten Pesisir Barat)

Oleh

HERNANDO

Kepariwisataan mempunyai peran penting untuk memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan, mendorong pembangunan daerah dan pendapatan asli daerah serta bertujuan untuk memperbesar pendapatan Nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Akan tetapi masyarakat belum juga sejahtera karena ketidakstabilan harga dan mempengaruhi kualitas damar dan harga yang tidak stabil mengakibatkan terancamnya keberlansungan hutan *rempong* damar. Tujuan penelitian ini mengetahui Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam Pengembangan Wisata Rempong Damar Pahmungan dengan menggunakan teori Anderson meliputi model pola kerja sama (*bargaining*), model persuasif (*persuasion*), dan pengarahan (*commanding*). Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukan hasil observasi, hasil wawancara dan studi dokumen menjelaskan bahwa telah menjalankan pola kerjasama dan persuasif tetapi indicator pengarahan belum terlaksana dengan baik. Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dalam pola kerjasama antara pihak pemerintah dan masyarakat melakukan pembibitan dan penanaman yang turut melibatkan langsung antara Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat serta masyarakat sekitar seperti menanam sampai kegiatan kerja bakti bersama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan hutan damar ini. Model persuasif yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat adalah keterlibatan pihak swasta dalam pengembangan kawasan wisata hutan rempong damar berupa program rehabilitasi *rempong* damar dan sumbangsih anggaran untuk pembangunan wisata. Indikator pengarahan yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat sebagai aktor perumus kebijakan belum mampu dalam melakukan analisis permasalahan yang terjadi dan belum dapat mengintegrasikan isu penurunan getah damar yang ada dalam penelitian ini dan belum ada solusinya dari Dinas Pariwisata KabupatenPesisir Barat terkait harga getah damar yang menurun.

Kata kunci: Perumusan Kebijakan, Pengembangan Ekowisata, Rempong Damar

ABSTRACT

FORMULATION OF POLICY FOR THE GOVERNMENT OF WEST COASTAL REGENCY IN THE DEVELOPMENT OF REMPONG DAMAR PAHMUNGAN FOREST TOURISM

by

HERNANDO

Tourism has an important role to expand and equalize business opportunities and employment opportunities, encourage regional development and regional original income and aims to increase national income in order to improve the welfare and prosperity of the people. However, the community is not yet prosperous because the price volatility affects the quality of the resin and the unstable price causes the sustainability of the rempong damar forest to be threatened. The purpose of this study was to determine the formulation of the Regional Government of Pesisir Barat Regency in the Development of Rempong Damar Pahmungan Tourism by using Anderson's theory including the model of bargaining, persuasive and (commanding). The method in this study uses descriptive qualitative. Data collection techniques with interviews. The results showed that the results of observations, interviews and document studies explained that the cooperative and persuasive pattern had been implemented but the direction indicators had not been implemented properly. The Pesisir Barat Regency Tourism Office in the pattern of cooperation between the government and the community conducts nurseries and plantings that involve directly between the Pesisir Barat Regency Tourism Office and the surrounding community, such as planting to community service activities in maintaining the cleanliness and sustainability of this damar forest area. The persuasive model carried out by the Pesisir Barat Regency Tourism Office is the involvement of the private sector in the development of the rempong damar forest tourism area in the form of a rempong damar rehabilitation program and budget contributions for tourism development. The indicator of direction carried out by the Tourism Office of Pesisir Barat Regency as an actor in formulating policies has not been able to analyze the problems that occur and have not been able to integrate the issue of reducing resin resin in this study and there is no solution from the Tourism Office of Pesisir Barat Regency regarding the declining price of resin resin.

Keywords: Policy Formulation, Ecotourism Development, Rempong Damar

PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PENGEMBANGAN WISATA HUTAN REPONG DAMAR PAHMUNGAN

Oleh

HERNANDO

Skripsi

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

Judul Skripsi	:	**PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN WISATA HUTAN REPONG DAMAR PAHMUNGAN (Studi Di Kabupaten Pesisir Barat)**
Nama Mahasiswa	:	Hernando
Nomor Pokok Mahasiswa	:	1646021023
Jurusan	:	Ilmu Pemerintahan
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.** .....

Penguji : **Dr. Ismono Hadi, M.Si.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **04 Februari 2022**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pemah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi Jain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pemyataan ini saya buat dengans esungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pemyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 11 Februari 2022

Yang Membuat Pemyataan,

Hernando

RIWAYAT HIDUP

Penulis di lahirkan di Krui, Pesisir Barat tanggal 12 Februrari 1998 anak kedua dari empat bersaudara, putra dari pasangan Bapak Herman dan Ibu Martina Wati. Penulis memulai jenjang pendidikannya di SDN Menyancang Pesisir Tengah tahun 2010 Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Di SMP Negeri 1 Pesisir Tengah pada Tahun 2013 dan melanjutkan pendidikan SMA Negeri 1 Pesisir Tengah selesai tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung Tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Ilmu Sosial Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.

MOTO

Jika Berpikir Tidak Mungkin Maka Tidak Akan Terjadi

Tanamkan Dalam Pikiran kemungkinan

Maka Ketidakmungkinan Akan Hilang

Dan Pasti Kamu Bisa Melakukannya

(13Summer)

Dipaksa, terpaksa, terbiasa

(**Hernando)**

PERSEMBAHAN

Alhamduillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhoi Ya Allah langkah hambaMu, Sehingga Skripsi ini pada akhirnya dapat terselesaikan pada waktunya.

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW Semoga Kelak Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

"Ayah Herman" Terima Kasih Doa dan Kasih Yang Tiada Habisnya serta Setiap Perjuangan yang Tertelah Curahkan untuk Seluruh Anak-Anaknya.

"Ibu Martina". Terima Kasih Sudah Melahirkanku dan Membesarkanku, Semua Kenangan, Canda Tawa yang kau berikan, Semoga kau disana di tempatkan yang terbaik di sisi-Nya. Aamiin

"Ibu Siti Juariah". Terima Kasih Sudah Membesarkanku, Semua Kenangan, Canda Tawa yang kau berikan.

"Kakak-kakakku dan Adik-adikku". Terima Kasih Atas Segala Doa, Kasih Sayang, Canda Tawa dan Semangat yang telah diberikan.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil`alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin dan kehendakNya semata, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul :**PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PENGEMBANGAN WISATA HUTAN REPONG DAMAR PAHMUNGAN,** sebagai salah satu syarat guna gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada.

1. Ibu Dra. Ida Nuraida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, semoga segala kebaikan dari Allah SWT dan ssegala keberkahan dari Allah SWT selalu tercurah untuk ibu baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. dan selaku Pembimbing Utama Penulis, Terima kasih atas ilmu agar tercipta skripsi ini, semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
3. Bapak Dr. Ismono Hadi, M.Si selaku penguji utama untuk penulis, terima kasih ilmu, saran, semangat dan motivasi guna terciptanya karya skripsi ini, terima kasih juga atas kebaikan dan rasa pengertian yang tinggi terhadap penulis yang bapak berikan, semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
4. Bapak Drs. Piping Setia Priangga, M.Si, Selaku dosen pembimbing akademik penulis. Terima kasih atas segala ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
5. Bapak Budi Kurniawan,S.IP, M.Pub, Pol, dosen pembimbing akademik penulis. Terima kasih atas segala ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
6. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan yang begitu berharga dalam proses perkuliahan. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

7. Kantor Pemerintah Kaupaten Pesisir Barat Lampung yang telah memberikan izin untuk melakukan .
8. Pengelola Wisata Repong Damar Pahmungan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.
9. Masyarakat Petani di Desa Pahmungan Kabupaten Pesisir Barat yang telah memberikan izin dan informasi untuk melakukan penelitian ini.
10. Keluargaku tercinta Papa, Mama, Kakak-kakakku dan Adik-adikku tersayang yang telah memberikan kasih dan sayang, semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Aku ingin menjadi anak yang selalu membahagiakan dan membanggakan kalian.
11. Sahabatku Rama, Igo, Irvan, Richat, Nuril dan Parhan yang telah memberikan bantuan dan motivasi yang tidak akan pernah terlupakan.
12. Keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon ilmu sosial dan politik, Komisariat Universitas Lampung, Trimakasih atas dukungan dan bimbinganya selama berproses
13. Yuli Asdarina yang telah memberikan dukungan, bantuan dan motivasi yangtidak akan pernah terlupakan.
14. Teman-teman Angkatan 2016 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan dan Barokah, dunia dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipat gandakan atas segala kebaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 2 Februari 2022

Hernando

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR..... v

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah..... 10
1.3. Tujuan Penelitian 10
1.4. Manfaat Penelitian 10

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Kebijakan Publik..... 11
2.2. Tinjauan Tentang Perumusan Kebijakan 13
2.3. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah 16
2.4. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah 19
2.5. Tinjauan Tentang Pengembangan Wisata..... 20
2.6. Tinjauan Tentang Wisata Hutan Damar 24
2.7. Kerangka Pikir..... 25

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian..... 27
3.2. Fokus Penelitian 28
3.3. Lokasi Penelitian 29
3.4. Jenis dan Sumber Data..... 30
3.5. Informan..... 30
3.6. Teknik Pengumpulan Data..... 31
3.7. Teknik Pengolahan Data 32
3.8. Teknik Analisis Data 33

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Desa Pahmungan Kabupaten Pesisir Barat 35
4.2. Potensi dan Daya Tarik Objek Ekowisata Desa Pahmungan 36

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian 38
5.2. Pembahasan Penelitian 48

KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Jumlah Petani Rempong Damar di Desa Pahmungan Kabupaten Pesisir Barat 3
2. Kualitas Getah Damar dan Harga Jual 5
3. Penelitian Terdahulu 8
4. Sebaran Penggunaan Lahan Masyarakat 36
5. Kesimpulan Hasil Penelitian Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam Pengembangan Wisata *Rempong* Damar Pahmungan..... 46
6. Triangulasi Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam Pengembangan Wisata *Rempong* Damar Pahmungan..... 47

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Gambar Kerangka Pikir 26
2. Peta Jalur Interpretasi Ekowisata Desa Pahmungan..... 55
3. Promosi Wisata Hutan Repong Damar Pahmungan..... 64
4. *Staycation* Wisata Hutan Repong Damar Pahmungan 65

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembuatan sebuah kebijakan seringkali dinyatakan dengan kata atau istilah yang berbeda-beda. Proses penyusunan kebijakan merupakan satu rangkaian aktivitas yang tidak terpisahkan dari sebuah proses kebijakan, artinya suatu aktivitas yang berlangsung secara simultan. Dalam proses penyusunan kebijakan terdapat proses tawar menawar (*bargaining*) yang terjadi antara aktor-aktor pembuat kebijakan dengan menggunakan kekuasaan dan kewenangan dilaksanakan bukan untuk menyinkronkan kepentingan rakyat namun digunakan untuk meraih kepentingan (*interest*) dan kekuasaan (*power*) itu sendiri (Madani, 2018:9).

Kebijakan yang baik akan terlaksana apabila kebijakan tersebut di implementasikan sesuai dengan tujuan utama kebijakan tersebut diformulasikan. Masukan dari kelompok kepentingan untuk sebuah kebijakan kerap kali dicari karena kelompok tersebut memiliki sesuatu yang berharga untuk ditawarkan. Kelompok tersebut berniai karena mereka mampu. Kelompok dikatakan mampu karena mereka memiliki informasi: mereka memberikan gagasan kebijakan dan memiliki fakta. Ketika angka keterwakilan kelompok tersebut tinggi, mereka juga dapat meningkatkan persentase keberhasilan kebijakan yang mereka usulkan (Halpin, Daugbjer dan Schvartzman, 2015:150).

Secara makro, dibutuhkan ketegasan kebijakan, strategi, regulasi, dan koordinasi lintas sector dari pemerintahan dan semua stakeholder untuk menjamin terlaksana poin-poin penting seperti pemberdayaan masyarakat, pemberantasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pendidikan yang secara tidak langsung akan mengubah budaya buruk dan paradigm di dataran bawah dalam hal perawatan gizi terhadap keluarga.

Semenjak diundangkannya Undang Undang No 10 Tahun 2009, tentang kepariwisataan pada tanggal 16 januari 2009, maka pada prinsipnya keseluruhan kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia harus mendasarkan diri pada prinsip dan kaidah yang terdapat pada undang-undang kepariwisataan tersebut beserta segenap peraturan perundangan pelaksanaannya.

Ada suatu prinsip penting tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia yang telah diamanahkan oleh UU No. 10 Th.2009, yaitu bahwa penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan pada asas: manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan, yang semuanya diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Kepariwisataan mempunyai peran penting untuk memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan, mendorong pembangunan daerah dan pendapatan asli daerah serta bertujuan untuk memperbesar pendapatan Nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Penyelenggaraan kepariwisataan harus dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya sehingga bisa mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta obyek dan daya tarik wisata itu sendiri (Baskoro, 2018:8).

Penyelenggaraan kepariwisataan mempunyai sifat yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sehingga harus dilaksanakan secara terpadu serta terarah oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam arti seluas-luasnya didalam penyelenggaraan kepariwisataan ini memegang peran penting demi terwujudnya pemerataan pendapatan dan kesempatan berusaha. Kegiatan-kegiatan kepariwisataan yang menyangkut aspek pembangunan, pengusahaan, dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah serta perkembangan yang begitu pesat dibidang kepariwisataan perlu diikuti dengan aspirasi bangsa Indonesia.

Pengelolaan hutan di Indonesia telah mengalami perubahan paradigma, di mana awalnya terlalu berbasis pada negara *(state based)*, khususnya di era orde baru, menjadi pengelolaan yang berbasis pada masyarakat *(community based*), yang dimulai di akhir masa pemerintahan orde baru hingga saat ini. Paradigma pembangunan sumber daya alam hutan dengan pendekatan community based ini disebut community forestry (kehutanan masyarakat). Sistem kehutanan masyarakat sebenarnya telah berkembang dengan baik di Indonesia dalam bentuk hutan rakyat, hutan adat, hutan keluarga, hutan desa maupun hutan kampung (Awang, 2018:45).

Tabel 1. Jumlah Petani *Repong* Damar di Desa Pahmungan Kabupaten Pesisir Barat

No	Dusun	Jumlah Penduduk	Jumlah Petani *repong* Damar (KK)	Persentase (%)
1	Dusun I	360	71	30,60
2	Dusun II	522	103	44,40
3	Dusun III	294	58	25,00
	Total	1176	232	100,0

Sumber : Diolah Peneliti, 2021

Pohon damar ditanam warga desa sejak 1829 menjadi komoditas primadona yang terkenal. Hingga kini, wilayah ini terus menghasilkan getah damar, seperti Kecamatan Pesisir Utara, Pesisir Tengah, Karya Pengawa, Ngambur, Bengkunat dan Pesisir Selatan. Getah damar asal pesisir Lampung hingga sekarang banyak dikirim ke mancanegara, termasuk negara-negara Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan hingga Filipina. Getah damar diperlukan dalam industri cat, tinta, farmasi dan kosmetik (Abdullah, 2017:4).

Tahapan pengelolaan lahan hutan sejak dari fase ladang hingga menjadi repong damar diimungkinkan berlangsung karena adanya landasan sistem pengetahuan yang telah kukuh di dalam kebudayaan orang Krui. Sistem pengetahuan tersebut dihasilkan dan proses belajar bersama warga masyarakat ketika berinteraksi dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial mereka dalam kurunn waktu lima belas tahun bahkan hingga puluhan tahun.

Oleh karena itu. dapat dipahami bahwa sistem pengelolaan hutan dengan pola repong damar tersebut merupakan khazanah pengetahuan budaya suku Krui yang terus disempurnakan dan waktu ke waktu. Pengetahuan lokal *(indigenous knowledge*) seperti halnya yang dimiliki oleh orang Krui dalam mengelola hutan adalah pengetahuan yang bersifat unik bagi setiap kebudayaan atau masyarakat (Abdullah, 2017:4).

Pengaruh kualitas sangat menentukan harga jual getah damar di pasaran, kualitas getah damar ditentukan oleh perlakuan petani terhadap getah. Apabila masa panen semakin lama, maka getah yang ada di pohon semakin banyak dan kualitas semakin baik. Namun, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi masa panen salah satunya adalah kebutuhan ekonomi petani. Hasil penjualan getah damar merupakan mata pencaharian utama bagi sebagian masyarakat di Krui, oleh karena itu terkadang petani terlalu cepat mengambil getah (panen)damar di pohon untuk segera dijual.

Tabel 2. Kualitas Getah Damar dan Harga Jual

No	Jenis damar (kualitas)	Harga	Keterangan Fisik
1.	A	Rp. 25.000/kg	Warna kuning bening dan merupakan bongkahan besar (berukuran 3 cm x 3 cm atau lebih), biasanya pengambilannya berumur lebih dari 30 hari.
2.	B	Rp. 24.000/kg	Getah damar kuning bening dan merupakan bongkahan yang agak kecil (berukuran 2 cm x 2 cm atau lebih), pengambilannya antara 3–4 minggu.
2.	AB	Rp. 23.000/kg	warna kuning agak kehitaman, merupakan bongkahan berukuran 2 cm x 2 cm atau lebih
2.	Semi (campuran A, B, C)	Rp. 20.000/kg	Warna kuning bening terdiri dari bongkahan besar, sedang dan kecil)
3.	AC	Rp. 16.000/kg	warna kehitam-hitaman dan berupa butiran kecil
4.	CK	Rp. 10.000/kg	Warna kehitaman dengan butiran kecil
5.	D2	Rp. 6.000/kg	Warna kehitaman butiran sangat kecil
6.	EE	Rp. 6.000/kg	Warna kehitaman butiran sangat kecil
7.	Debu	Rp. 5.000/kg	Kualitas Debu: damar berwujud debu

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2021

Harga getah damar juga dipengaruhi oleh rantai perdagangan mulai dari repong sampai siap ekspor ke luar negeri. Rantai tata niaga mulai dari penduduk dan beberapa pedagang, melalui Pasar Krui, menuju Bandar Lampung dan kemudian ke Jakarta selanjutnya siap ekspor ke negara tujuan. Rantai perdagangan ini dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, yang masing-masing ditandai dengan adanya agen.

Dari kebun, petani dapat menjual hasil ke pembeli di kebun atau lebih dikenal dengan sebutan penghadang atau ada juga petani yang mengumpulkan dahulu hasil panennya dan menjualnya pada pembeli di desa atau pengumpul. Di pekon (desa) penghasil damar umumnya terdapat 5 sampai 10 pengumpul yang mayoritas juga mempunyai kebun damar. Di desa, beberapa pedagang damar mengumpulkan produksi harian dai kebun atau pedagang pengumpul, mengeringkan dan kemudian menjual ke pedagang besar di Pasar Krui atau kepada agen yang langsung

membawanya ke Jakarta. Pedagang yang ada di desa sering melakukan sortasi awal untuk mendapatkan damar dengan kualitas baik, sedang dan rendah.

Salah satu pusat damar adalah di Pekon (desa) Pahmungan, Kecamatan Pesisir Tengah, yang memiliki luas wilayah sekitar 2.500 hektar, dengan luas *Repong*, istilah untuk kebun-hutan damar, Sekitar 350 kepala keluarga di Pekon Pahmungan, Lampung, terbukti mampu menjaga repong atau kebun damar tetapi masyarakat belum juga sejahtera karena ketidakstabilan harga dan mempengaruhi kualitas damar dan harga yang tidak stabil mengakibatkan terancamnya keberlansungan pohon damar karena banyak petani yang mngalih fungsi kan kebun damar dan menebang nya untuk di gantikan dengan tanaman lain seperti sawit, karet dll, kebijakan pemerintah diperlukan agar masyarakat yang bergantung pada hasil hutan dapat sejahtera.

Walaupun harga damar pada tahun 2021 terbilang cukup tinggi dengan harga per kilo nya menyentuh harga 30 ribu untuk damar asalan (Damar yang baru di panen/belum masuk dalam penyortiran) tidak juga bisa menjamin masyarakat sejehtera, pasalnya jika rata-rata pendapatan petani dalam satu bulan panen getah damar 50 kg di kali harga sekarang yaitu 30 ribu per kilo yaitu 1.500.000, terbilang jauh untuk di katakan sejahtera mengingat Upah minimum regional di pesisir barat yaitu 2,432,001, belum lagi jika musim hujan tiba yang mengakibatkan kurang efektif nya produksi getah damar, dan pohon damar yang sudah tua dan tidak produktif lagi perlunya inovasi dan solusi dari pihak pemerintah kab.pesisisr barat untuk memcarikan solusi untuk kesejahteraan petani damar.

Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan merepresentasikan pemikiran kehutanan masyarakat melalui program Hutan Kemasyarakatan (HKm). Sejak awal digulirkannya pada tahun 1995 hingga saat ini, program HKm mengalami berbagai perubahan peraturan demi perbaikan pelaksanaan di

lapangan. Program HKm dilakukan di lahan hutan negara yang selanjutnya disebut lahan/areal HKm. Prinsip dari program HKm adalah pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Masyarakat diberikan izin secara formal untuk mengelola lahan hutan negara melalui kelompok tani dan koperasi (Galudra., 2019:35).

HKm di Pesisir Barat Provinsi Lampung wilayah ini terus menghasilkan getah damar, seperti Kecamatan Pesisir Utara, Pesisir Tengah, Karya Pengawa, Ngambur, Bengkunat dan Pesisir Selatan. Getah damar asal pesisir Lampung hingga sekarang banyak dikirim ke mancanegara, termasuk negara-negara Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan hingga Filipina. Getah damar diperlukan dalam industri cat, tinta, farmasi dan kosmetik (Sanudin., 2018:7).

Program HKm dilaksanakan baik pada kawasan hutan produksi maupun hutan lindung. Sesuai dengan fungsi masing-masing hutan, maka terdapat perbedaan kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Pada HKm hutan produksi, masyarakat dapat melakukan enam poin kegiatan antara lain: pemanfaatan kawasan, penanaman tanaman hutan berkayu, pemanfaatan jasa lingkungan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. (Sanudin., 2018:9).

Repong damar itu hutan alam bagian dari kawasan TNBBS. Namun kenyataannya berada di luar kawasan konservasi. Salah satu yang menyebabkan *repong* damar yang ada di Kabupaten Pesisir Barat terus menerus mengalami penurunan adalah maraknya aksi *illegal logging*. Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas bahwa isu tentang keberlangsungan ketercukupan ekonomi dari para pelaku kegiatan konservasi sumberdaya alam semacam *repong* damar sangatlah rentan. Disinilah penting bagi pemerintah untuk memerankan fungsinya dalam

membuat beragam kebijakan yang terkait dengan persoalan-persoalan kesejahteraan masyarakat petani damar dan kelestarian lingkungan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat.

Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini. Penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Topik
1.	Miwan (2015)	Analisis Partisipasi Publik Dalam Perumusan Kebijakan Daerah (Studi Kasus Perumusan Perda Dki Jakarta)	Penelitian ini adalah deskripsi tahapan-tahapan dalam perumusan Perda Nomor 4 tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas di DKI Jakarta,
2.	Freddy Priyanto (2019)	Analisis Peran Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Potensi Batu Kapur Di Desa Sampung	penelitian ini adalah mendeskripsikan Perumusan Kebijakan Pengelolaan Potensi Batu Kapur Di Desa Sampung
3.	Andi Sulastri (2020)	Model Perumusan Kebijakan Stunting Di Desa Labbo Kabupaten Bantaeng	penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan stunting di desa labbo Kabupaten Bantaeng, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan Stunting di desa labbo kabupaten bantaeng.

Sumber: Diolah Peneliti, 2020.

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas bahwa isu tentang keberlangsungan ketercukupan ekonomi dari para pelaku kegiatan konservasi sumberdaya alam semacam *repong* damar sangatlah rentan. Disinilah penting bagi pemerintah untuk memerankan fungsinya dalam membuat beragam kebijakan yang terkait dengan persoalan-persoalan kesejahteraan masyarakat petani damar dan kelestarian lingkungan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat.

Bagaimanapun akhirnya, perjalanan inisiasi isu terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat petani damar dan pelestarian *repong* damar yang menjadi benteng bagi TNBBS hingga menjadi sebuah agenda kebijakan merupakan suatu hal yang penting untuk diteliti. Ketika sebuah masalah publik bertahan sekian lama dan belum ada solusi nyata, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mewujudkannya menjadi sebuah kebijakan. Proses inisiasi pelestarian repong damar dan kesejahteraan masyarakat petani damar yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat hingga masuk ke ranah kebijakan dapat dikatakan sebagai proses inisiasi kebijakan yang berjalan tanpa suatu hambatan berarti.

Pro dan kontra tetap ada, namun tidak terlalu banyak menghalangi jalannya inisiasi kebijakan hingga menjadi agenda kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perumusan kebijakan yang akan disahkan oleh pemerintah. Maka peneliti tertarik mengangkat permasalahan dalam penelitian ini dengan judul "Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam Pengembangan Wisata *Repong* Damar Pahmungan".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam Pengembangan Wisata *Repong* Damar Pahmungan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dirumuskan manfaat penelitian ini adalah mengetahui Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam Pengembangan Wisata *Repong* Damar Pahmungan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah tentang Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam Pengembangan Wisata *Repong* Damar Pahmungan dan menjadi bahan referensi bagi peneliti di bidang Ilmu Pemerintahan.

1.4.2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini mampu memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sebagai pembuat peraturan dan kebijakan sesuai dengan pelestarian kebudayaan lokal.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

Anderson (dalam Islamy, 2014) mengatakan bahwa kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Berdasarkan pengertian tentang kebijakan yang telah diurai-kan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan da-pat dilakukan secara umum, namun pada kenyataannya lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam tindakan-tindakan atau perilaku pemerintah serta perilaku.

Negara pada umum-nya yang lebih dikenal dengan sebutan kebijakan Negara atau kebijakan publik (*publik policy*). Berdasarkan pengertian tentang kebijakan dan kebijakan publik yang telah diuraikan di atas, Islamy mengemukakan beberapa elemen penting tentang kebijakan Negara (*public policy*), yaitu:

a. Bahwa kebijakan Negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah
b. Kebijakan Negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
c. Kebijakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perlu dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
d. Kebijakan Negara harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat. (Islamy, 20014: 20).

Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan (Parsons, 2012:32). Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini dapat dimengerti, bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seringkali ada anggapan setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dilaksana-kan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut.

Dalam proses kebijakan publik yang akan diterapkan, melalui proses/tahapan yang cukup panjang. Dunn (2000) menambahkan bahwa masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum ter-penuhi, tetapi yang dapat diidentifikasikan dan dicapai mela-kukan tindakan publik. Perumusan masalah, sebagai salah satu tahap dalam proses penelitian di mana analis mera-ba-raba untuk mencari definisi yang mungkin mengenai situasi problematis, tak disangkal merupakan aspek yang paling rumit tatapi paling sedikit difahami dalam analisa kebijakan. Proses perumusan masalah kebijakan tidak mengikuti aturan-aturan yang definitif, karena masalah kebijakan itu sendiri sedemi-kian kompleks. Karena itu, masalah kebijakan merupakan tahap paling kritis dalam analisa kebijakan, karena analis lebih sering memecahkan masalah yang salah dari pada menemukan pemecahan yang salah atas masalah yang benar. Kesalahan fatal dalam analisa kebijakan adalah memecahkan rumusan masalah yang salah karena analis dituntut untuk memecahkannya secara benar.

2.2. Tinjauan Tentang Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan merupakan suatu tahapan yang tidak dapat di hilangkan dari proses kebijakan. Penelitian mengenai proses formulasi kebijakan pada umumnya memiliki kekurangan. Berlan dkk (2014:28) dalam Pritasari, L. A., & Kusumasari, B. 2019 , Kebijakan yang baik akan terlaksana apabila kebijakan tersebut di implementasikan sesuai dengan tujuan utama kebijakan tersebut diformulasikan. Masukan dari kelompok kepentingan untuk sebuah kebijakan kerap kali dicari karena kelompok tersebut memiliki sesuatu yang berharga untuk ditawarkan.

Kelompok tersebut berniai karena mereka mampu. Kelompok dikatakan mampu karena mereka memiliki informasi: mereka memberikan gagasan kebijakan dan memiliki fakta. Ketika angka keterwakilan kelompok tersebut tinggi, mereka juga dapat meningkatkan persentase keberhasilan kebijakan yang mereka usulkan (Halpin, Daugbjer dan Schvartzman, 2011:150).

Menurut Suharno (2018:52) dalam Laniari, M. 2015 proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut untuk memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intendedrisks*) maupun yang tidak di harapkan (*unintendedrisks*).

Dalam perspektif lain sebagaimana ditegaskan oleh Anderson bahwa model atau tipe pengambilan kebijakan dikaitkan dengan proses pembahasannya dalam agenda kebijakan publik dapat dibedakan dalam tiga bentuknya, yaitu pola kerjasama (*bargaining*), persuasif (*persuasion*), dan pengarahan (*commanding*). Anderson menegaskan bahwa prhoses bargaining dapat

terjadi dalam tiga bentuknya yaitu negosiasi (*negotiation*), saling memberi dan menerima (*take and give*) dan kompromi (*compromise*). Sesungguhnya penjelasan bargaining berakar pada istilah bahwa jika terdapat dua atau lebih aktor atau kelompok aktor yang masing-masing memiliki kewenangan dan posisi tertentu tetapi dapat melakukan penyesuaian yang diharapkan dapat terbangun dalam sistem pembahasannya.

Pada pembahasan mengenai kebijakan publik, maka aktor mempunyai posisi yang sangat strategis bersama-sama dengan faktor kelembagaan (*institusi*) kebijakan itu sendiri. Kelembagaan merupakan penentu proses perjalanan dan strategi yang dilakukan oleh komunitas kebijakan dalam makna yang lebih luas. Perumusan permasalahan publik merupakan fundamen besar dalam merumuskan kebijakan publik sehingga arahnya menjadi benar, tepat dan sesuai (Bintari, 2016).

Menurut Howlett dan Ramesh dalam Madani (2018:36) menjelaskan bahwa pada prinsipnya aktor kebijakan adalah mereka yang selalu dan harus terlibat dalam setiap proses analisa kebijakan publik, baik berfungsi sebagai perumus maupun kelompok penekan yang senantiasa aktif dan proaktif di dalam melakukan interaksi dan interelasi di dalam konteks analisis kebijakan publik. Anderson dalam Madani (2018:37) bahwa aktor kebijakan meliputi aktor internal birokrasi dan aktor eksternal yang selalu mempunyai konsen terhadap kebijakan.

Aktor individu maupun kelompok yang turut serta dalam setiap perbincangan dan perdebatan tentang kebijakan publik. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa aktor kebijakan yaitu seorang maupun sekelompok orang yang terlibat dalam penentu kebijakan, baik pada proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Aktor kebijakan ini dapat berasal dari pejabat pemerintah, masyarakat, kaum buruh, maupun kelompok kepentingan.

Menurut Anderson dalam Madani (2018:41), menyatakan bahwa: Dengan memperhatikan berbagai ragam dan pendekatan dalam memahai berbagai aktor yang terlibat dalam proses kebijakan publik, maka konsep dan konteks aktor adalah sangat terkait dengan macam dan tipologi kebijakan yang akan dianalisis. Dalam perspektif formulasi masalah kebijakan publik, maka aktor yang terlibat secara garis besarnya dapat dipilah menjadi dua kelompok besar yaitu kelompok dalam organisasi birokrasi (*the official policy makers*) dan yang lain adalah keelompok di luar birokrasi (*un-official policy maker*).

Proses pembuatan sebuah kebijakan publik melibatkan berbagai aktivitas yang kompleks. Pemahaman terhadap proses pembuatan kebijakan oleh para ahli dipandang penting dalam upaya melakukan penilaian terhadap sebuah kebijakan publik. tahapan perumusan kebijakan merupakan tahap kritis dari sebuah proses kebijakan. Hal ini terkait dengan proses pemilihan alternatif kebijakan oleh pembuat kebijakan yang biasanya mempertimbangkan besaran pengaruh langsung yang dapat dihasilkan dari pilihan alternatif utama tersebut. Proses ini biasanya akan mengekspresikan dan mengalokasikan kekuatan dan tarik menarik diantara berbagai kepentingan sosial, politik dan ekonomi.

Stone menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan teori stratifikasi (*stratification theory*), perumusan kebijakan menempatkan suatu sistem yang mana para pejabat publik merumuskan suatu kebijakan dalam konteks yang secara strategis mempunyai sumber daya yang amat penting yaitu susunan hierarki (*hierarchichally arrange*). Oleh karena itu berkenaan dengan kebijakan publik, maka para pejabat publik keberadaannya amat bergantung pada kepentingan strata kekuasaan yang lebih tinggi. Stone menjelaskan bahwa perilaku pejabat publik seperti itu merupakan asumsi dasar daripada pendekatan kekuasaan sistemik dimana para pejabat publik berusaha mengejar apa yang menjadi kepentingan mereka yang kemudian

menghasilkan suatu relasi dimana tingkatan jabatan tertinggi akan lebih diuntungkan daripada kepentingan strata yang paling rendah.

2.3. Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembatuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Esensi pemerintah daerah berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur urusan rumah tangga pemerintahannya (Moenta, Pradana, 2018:25-26)

Kewenangan pemerintahan daerah tersebut akan berhubungan dengan pola pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraaan pemerintahan yang mengacu dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan yang menyangkut tentang pemerintahan daerah telah diakomodasikan dalam Pasal 18 UUD 1945 penjelasannnya. Di dalamnya mengakui adanya keragaman dan hak asal-usul yang merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia.

Kajian pemerintah negara kesatuan diformat dalam dua bentuk sendi utama yaitu sistem pemerintahan yang sifatnya sentralistik dan sifatnya yang desentralistik. Kedua sifat ini menciptakan karakter hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang terkait dengan bentuk, susunan dan pembagian kekuasaan atau kewenangan yang ada pada negara. Artinya apakah dari bentuk dan susunan negara, apakah kekuasaan itu akan dibagi atau diberikan kepada pemerintah daerah atau kekuasaan itu dipusatkan pada pemerintah pusat.

Dari sisi pembagian kekuasaan dalam negara akan dapat menimbulkan bentuk sistem pemerintahan yang sentralistik maupun desentralistik yang secara langsung dapat mempengaruhi hubungan antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, pada suatu ketika bobot kekuasaan terletak pada pusat dan pada kesempatan lain bobot kekuasaan berada pada pemerintah daerah.

Kemudian masing-masing pemerintahan daerah tersebut memiliki karakteristik sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi dan perkembangan sistem politik negara dan termasuk besar kecilnya bobot kekuasaan antara pusat dan daerah pada masing-masing kurun waktu berlakunya masing-masing undang-undang tersebut. *Kedua,* karena adanya perbedaan persepsi dalam implementasi terhadap undang-undang pemerintahan daerah sebagai akibat dominasi kepentingan penguasa saat berlakunya undang-undang pemerintah daerah tersebut (Moenta & Pradana, 2018:25-26).

Adapun beberapa undang-undang pemerintahan daerah yang berlaku di Indonesia sejak zaman kemerdekaan sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan di Daerah
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah
4. Penetapan Presiden (Pen Pres) Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Sehubungan dengan itu maka konteks penataan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mengacu pada konsep negara kesatuan yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik". Dengan istilah negara kesatuan ini dimaksudkan bahwa susunan negaranya hanya terdiri dari satu negara saja, dan tidak dikenal adanya negara di dalam negara seperti halnya pada suatu negara federal oleh karena negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat* maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga.

Menyadari wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia yang demikian luas bahkan terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang terhubung dari Sabang sampai Marauke, maka hal yang tidak mungkin jika segala urusan pemerintahan sampai ke pelosok daerah secara keseluruhan diurus secara terpusat oleh pemerintahan pusat yang berkedudukan di ibukota negara. Untuk itu, perlu dibentuk pemerintahan daerah yang dapat menyelenggarakan pemerintahan secara langsung dapat berhubungan dengan masyarakat luas. Itu pun harus dibentuk sesuai tingkatannya antara pemerintahan daerah yang satu dengan lainnya sehingga satu pemerintahan daerah dapat memiliki hubungan dengan pemerintahan daerah bawahan (Moenta & Pradana, 2018:25-26)

Kemudian antara pemerintah daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat pembagian wilayah sesuai dengan batas kewenangan masing-masing. Dengan demikian wilayah negara telah disusun secara tertib baik vertical maupun horizontal. Sehingga batas susunan wilayah kewenangan masing-masing daerah dapat dilihat secara tegas. Sehubungan denngan itu maka pemerintah daerah dikenal bentuknya dalam dua jenis sebagai berikut:

a. Pemerintahan Daerah Administratif
b. Pemerintahan Daerah Otonom

2.4. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah

Kata otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *autos* yang berarti "sendiri" dan *nomous* yang berarti "hukum" atau disebut juga sebagai "peraturan" (Widarta, 2001:2). Sedangkan secara etimologis otonom berarti "berdiri sendiri" atau "dengan pemerintah sendiri" (Jasin, 2019:118). Sedangkan dari dari sudut pandang pengertian politik, otonomi daerah sendiri merupakan hak untuk mengatur sendiri kepentingan organisasi internal daerah menurut hukumnya sendiri (Marbun, 2017:350). Maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya otonomi memilikimakna kebebasan dan kemandirian dalam menjalankan pemerintahan secara sendiri.

Indonesia adalah penganut sistem Negara kesatuan, dimana daerah otonomnya adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya yang disesuaikan dengan kepentingan, kebutuhan dan aspirasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa otonomi daerah adalah kemandirian dan keleluasaan setiap wilayah atau daerah untuk dapat mengatur dan mengelola serta mengakomodir kepentingan wilayah/daerah yang meliputi ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungan masyarakat itu sendiri (Jasin, 2019:116).

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 angka 6, menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut, yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.

2.5. Tinjauan Tentang Pengembangan Wisata

Sebelum berbicara ke pengembangan pariwisata, terlebih dahulu kita berbicara tentang pariwisata itu sendiri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan (Baskoro, 2018:22).

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, pengertian pengembangan adalah: Pertama, pengembangan adalah hal, cara atau hasil mengembangkan. Kedua, pengembangan adalah proses atau cara, perbuatan mengembangkan ke sasaran yang dikehendaki. Ditambahkan oleh Darminta pengembangan adalah suatu proses atau cara menjadikan sesuatu menjadi maju, baik, sempurna, dan berguna. Pengembangan dalam penelitian ini diartikan sebagai proses atau perbuatan pengembangan dari belum ada, dari yang sudah ada menjadi lebih baik dan dari yang sudah baik menjadi lebih baik (Baskoro, 2018:24).

Pengembangan pariwisata menurut Pearce dapat diartikan sebagai usaha untuk melengkapi atau meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Dalam pengembangan pariwisata, terdapat faktor yang dapat menentukan keberhasilan pengembangan pariwisata yaitu:

a. Tersedianya objek dan daya tarik wisata.
b. Adanya fasilitas aksesbilitas yaitu sarana dan prasarana sehingga memungkinkan wisatawan mengunjungi suatu daerah atau kawasan wisata.
c. Tersedianya fasilitas amunitas yaitu sarana kepariwisataan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat (Baskoro, 2018:26)

Pengembangan pariwisata tidak lepas dari perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan pembangunan di sektor lainnya. Maka di dalam pengembangan pariwisata dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu. Dari pemikiran di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah suatu proses atau cara yang terjadi secara terus menerus, untuk menjadikan sesuatu objek tersebut menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan kebutuhkan masyarakat secara keseluruhan. Pengembangan pariwisatamempunyai dampak positif maupun dampak negatif, maka diperlukannya perencanaan untuk menekan sekecil kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan.

Spillane menjelaskan mengenai dampak positif maupun dampak negatif dari pengembangan pariwisata. Dampak positif, yang diambil dari pengembangan pariwisata meliputi:

a. Penciptaan lapangan pekerjaan, di mana pada umumnya pariwisata merupakan industri padat karya di mana tenaga kerja tidak dapat digantikan dengan modal atau peralatan.
b. Sebagai sumber devisa negara.
c. Pariwisata dan distribusi pembangunan spiritual, di sini pariwisata secara wajar cenderung mendistribusikan pembangunan dari pusat industri ke arah wilayah desa yang belum berkembang, bahkan pariwisata disadari dapat menjadi dasar pembangunan regional.

Struktur perekonomian regional sangat penting untuk menyesuaikan dan menentukan dampak ekonomis dari pariwisata.

Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya pengembangan pariwisata meliputi:

a. Pariwisata dan vulnerability ekonomi, karena di negara kecil dengan perekonomian terbuka, pariwisata menjadi sumber mudah kena serang atau luka (vulnerability), khususnya kalau negara tersebut sangat tergantung pada satu pasar asing.
b. Banyak kebocoran yang sangat luas dan besar, khususnya kalau proyek-proyek pariwisata berskala besar dan diluar kapasitas perekonomian, seperti barang-barang impor, biaya promosi keluar negri, tambahan pengeluaran untuk warga negara sebagai akibat dari penerimaan dan percontohan dari pariwisata dan lainnya.
c. Polarisasi spasial dari industri pariwisata di mana perusahaan besar mempunyai kemampuan untuk menerima sumber daya modal yang besar dari kelompok besar perbankan atau lembaga keuangan lainnya (Baskoro, 2018:25-26)

Menurut Prof. Salah Wahab dalam Oka A Yoeti (2008), Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar, yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri/ diluar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya, dimana ia memperoleh pekerjaan tetap.

Pengembangan pariwisata sebagai suatu industri secara ideal harus berlandaskan pada empat prinsip dasar, yaitu:

a. Kelangsungan ekologi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus menjamin agar terciptanya pemeliharaan dan proteksi terhadap

sumberdaya alam yang akan menjadi daya Tarik pariwisata, seperti lingkungan laut, hutan, pantai, danau, dan sungai.

b. Kelangsungan kehidupan sosial dan budaya, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus mampu meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan tata kehidupan melalui sistem nilai yang dianut masyarakat setempat sebagai identitas masyarakat tersebut.
c. Kelangsungan ekonomi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus dapat menciptakan kesempatan kerja bagi semua pihak untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi melalui suatu sistem ekonomi yang sehat dan kompetitif (Baskoro, 2018:26)

Memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui pemberian kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata. Dengan demikian, pengembangan pariwisata perlu didukung dengan perencanaan yang matang dan harus mencerminkan tiga dimensi kepentingan, yaitu industri pariwisata, daya dukung lingkungan (sumber daya alam), dan masyarakat setempat dengan sasaran untuk peningkatan kualitas hidup.

Untuk mengetahui lebih dalam peneliti akan menambahkan unsur 4M untuk melihat pelaksanaan dari pengembangan wisata Hutan Damar Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari *man, money, material*, dan *method* atau yang lebih dikenal dengan 4M:

a. Man

Yakni Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan manajemen dan produksi. Dengan adanya faktor SDM, kegiatan manajemen dan produksi dapat berjalan, karna apada dasarnya faktor SDM sangat berperan penting dalam kegiatan manajemen dan produksi.

b. Money

Yakni faktor pendanaan atau keuangan. Tanpa ada keuangan yang memadai kegiatan perusahaan atau organisasi takkan berjalan sebagaimana mestinya, karna pada dasarnay keuangan ialah darah dari perusahaan atau organisasi. Hal keuangan ini berhubungan dengan anggaran, upah karyawan, dan pendapatan perusahaan atau organisasi.

c. Material

Yakni berhubungan dengan barang mentah yang akan diolah menjadi barang jadi. Dengan adanya barang mentah maka dapat dijadikan suatu barang yang bernilai sehingga dapat mendatangkan keuntungan.

d. Method

Yakni tata cara melakukan kegiatan manajemen secara efektif dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran agar tercapai suatu tujuan akan dituju. (Firmansyah, 2018: 5-6).

2.6. Tinjauan Tentang Wisata Hutan Damar

Di Provinsi Lampung, Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah penghasil damar mata kucing yang pemasarannya sudah menjangkau pasar internasional, seperti India, Cina, dan Amerika Serikat. Bersamaan dengan eksistensinya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menginisiasi kebun damar untuk dijadikan tempat wisata berbasis potensi daerah. Berlokasi di Desa Pahmungan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, desa ekowisata damar resmi dibuka untuk umum pada 29 November 2019, yang sebelumnya hanya dikunjungi untuk keperluan penelitian saja.

Kebun damar, dalam bahasa setempat disebut Repong Damar, pada dasarnya adalah hutan rakyat. Masyarakat Pesisir Barat secara turun temurun dan rutin menanam pohon damar mata kucing. Sehingga ada

semacam hubungan timbal balik positif antara warga dan lingkungan. Pohon damar yang terbaik adalah damar mata kucing dengan nama latin *Shorea javanica*. Getah yang dihasilkan dinamakan getah mata kucing. Bentuk damar mata kucing seperti bongkahan kristal, ada yang putih bening ada juga yang berwarna kekuningan.

Repong Damar merupakan salah satu bentuk agroforestri yang banyak menarik perhatian baik peneliti dari dalam negeri maupun peneliti dari luar negeri. Repong Damar menjadi potensi wisata yang patut dikembangkan karena selain sebagai situs budaya juga sebagai salah satu komoditas tanaman komersil yang perlu diketahui lebih banyak dan lebih lanjut oleh masyarakat luas. Faktor yang menyebabkan Repong Damar memiliki daya tarik wisata alam yaitu karena Repong Damar memiliki kekhasan untuk dijadikan sebagai objek wisata budaya.

Di samping itu juga sudah disiapkan para pemandu wisata, pengadaan *homestay*, yang keduanya dikelola oleh masyarakat desa Pahmungan, sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi bagi masyarakat. Salah satu penghasil damar mata kucing yang terkenal memiliki kualitas bagus ternyata ada di Provinsi Lampung, tepatnya di Kabupaten Pesisir Barat. Ada 4 (empat) wilayah di Pesisir Barat yang terdapat perkebunan damar yang cukup luas hingga ribuan hektar. Pekon Gunung Kemala, di Kecamatan Way Krui dan Pekon Pahmungan di Kecamatan Pesisir Tengah, serta Pekon Penengahan dan Pekon Laay di Kecamatan Karya Penggawa.

2.7. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel

yang diteliti (Haryoko dalam Sugiyono, 2014:60). Berikut di bawah ini merupakan bagan kerangka pikir:

Gambar 1. Kerangka Pikiran

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif Penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan secara terperinci mengenai Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam Pengembangan Wisata *Repong* Damar Pahmungan . Hal ini sehubungan dengan pengertian metode deskriptif yang menggambarkan sebuah peristiwa dan keadaan dengan sejelas-jelasnya tanpa mempengaruhi obyek yang ditelitinya (Jauhari, 2010:34).

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif karena permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini lebih menekankan pada pemusatan pemerhatian pada masalah ataupun situasi yang aktual untuk menggambarkan dan mengetahui proses atau kejadian yang sedang berlangsung sebagai bagian dari fenomena sosial. Pemusatan perhatian dari situasi ataupun masalah aktual yang diteliti pada penelitian yang akan dilakukan mengenai ketidakstabilan harga getah damar yang dirasakan oleh petani di *Repong* Damar Pahmungan Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam Pengembangan Wisata *Repong* Damar Pahmungan didasarkan pada persepsi, eksplorasi, pemikiran dan pengembangan

konsep. Pelaksanaan penelitian ini, manusia yang menjadi instrumen penelitian. Hal tersebut sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang lentur dan mengikuti pola pemikiran manusia. Diharapkan sifat inilah mampu secara tanggap merespon kondisi dan kenyataan di lapangan selama pelaksanaan penelitian.

3.2 Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini yang di maksud adalah perumusan kebijakan berkaitan dengan model perumusan kebijakan dalam pengembangan wisata hutan damar menggunakan model dan tipe perumusan kebijakan menurut Anderson yaitu model pola kerja sama (*bargaining*), model persuasif (*persuasion*), dan pengarahan (*commanding*). Berdasarkan fokus penelitian yang telah di uraikan penulis kemudian akan dideskripsikan berikut ini:

a. Model pola kerja sama (*bargaining*)

   Pada model kerja sama (*bargaining*) dapat terjadi dalam tiga bentuknya yaitu negosiasi (*negotiation*) adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaukan tujuan yang berbeda dan bertentangan, saling memberi dan menerima (*take and give*) dan kompromi (*compromise*) merupakan upaya untuk memperoleh kesepakatan di antara dua pihak yang saling berbeda pendapat atau pihak yang berselisih.

b. Model persuasif (*persuasion*).

   Model persuasi (*persuasion*) ialah adanya polarisasi kelompok dalam perumusan kebijakan, yang di maksudkan polarisasi kelompok adalah adanya kelompok aktor yang menyebabkan aktor lain mengubah keputusan mereka ini bisa di lihat dari adanya negosiasi dan kompromi yang di lakukan oleh aktor perumus kebijakan, baik ke arah yang lebih

teliti, atau lebih mengandung resiko dengan mengumpulkan pendapat kelompok aktor sampai tahap penentuan suatu kebijakan.

c. Pengarahan (*commanding*).

Pola hubungan dan interaksi antara aktor pada model ini adalah berkaitan dengan pola perumusan kebijakan yang sangat struktural, dimana satu kelompok aktor menjadi superordinat dan kelompok yang lain tentu saja menjadi subordinat. Tipe pengambilan kebijakan menempatkan posisi ini mirip dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga perumus pengelolaan sumber daya alam daerah dalam bentuk kebijakan.

Dalam pengembangan pariwisata, terdapat faktor yang dapat menentukan keberhasilan pengembangan pariwisata yaitu:

1. Tersedianya objek dan daya tarik wisata.
2. Adanya fasilitas aksesbilitas yaitu sarana dan prasarana sehingga memungkinkan wisatawan mengunjungi suatu daerah atau kawasan wisata.
3. Tersedianya fasilitas amunitas yaitu sarana kepariwisataan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat (Baskoro, 2018:26).

3.3 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. Lokasi dalam penelitian ini terletak di Kantor Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Peneliti memilih Kabupaten Pesisir Barat sebagai lokasi penelitian karena merupakan daerah yang memiliki potensi wisata hutan damar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat bersama masyarakat setempat untuk mengembangkan petensi wisata yang ada di daerah tersebut sesuai kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiono (2003:) data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan bukan angka dapat berupa gejala-gejala, kejadian dan peristiwa yang kemudian di analisis dalam bentuk kategori Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

3.4.1 Data Primer

Data yang diperoleh melalui pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada narasumber. Data primer dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara berdasarkan panduan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yaitu Kepala Bidang Pengembangan Wisata pada Kantor Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Pengelola wisata *Repong* Damar Kabupaten Pesisir Barat, Masyarakat Petani di Desa Pahmungan Kabupaten Pesisir Barat, Pariwisatawan/Pariwisatawati yang berkunjung wisata *Repong* Damar Kabupaten Pesisir Barat.

3.4.2 Data Skunder

Data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data ini diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu, buku-buku, surat kabar *online,* artikel website, dokumen-dokumen seperti Peraturan Menteri dalam Negeri.

3.5 Informan

Informan menurut Sugiyono (2014:218) adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling* karena peneliti meyakini bahwa informan yang dipilih adalah sebagai aktor yang mengetahui pengembangan wisata *Repong* Damar dan pembuat

kebijakan dari harga getah damar. Berdasarkan penentuan tersebut, informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Pengembangan Wisata pada Kantor Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
2. Pengelola wisata *Repong* Damar Kabupaten Pesisir Barat
3. Masyarakat Petani di Desa Pahmungan Kabupaten Pesisir Barat

Peneliti memilih informan tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan dan dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.6.1 Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap fenomena yang akan dikaji. Arikunto (2006) menjelaskan bahwa observasi atau pengamatan merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi digunakan untuk lebih mendapatkan gambaran nyata dilapangan.

3.6.2 Wawancara

Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka *(face to face relationship)* antara sipencari informasi (*interviewer atau information hunter*) dengan sumber informasi (*interview*). Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan

tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi (Nawawi, 2001:45). Materi wawancara adalah tema yang ditanyakan kepada informan, berkisar antara masalah dan tujuan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif teknik wawancara merupakan cara utama untuk mengumpulkan data. Wawancara bertujuan untuk menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami oleh informan, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh didalam diri informan. Apa yang ditanyakan kepada informan dapat mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau,masa sekarang dan masa depan.

3.6.3 Dokumentasi

Teknik dokumentasi pada penelitian ini dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis. Dokumen merupakan suatu cara untuk mendapatkan data maupun informasi secara langsung dangan cara membaca dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Kumpulan data tersebut berdasarkan pada buku-buku, literatur dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian karena hasil dari pengolahan data akan berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Subagyo, 2006). Data yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

3.7.1 Editing

Editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan terhadap fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan.

3.7.2 Interprestasi Data

Interpretasi pada tahapan ini data penelitian yang telah di deskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya di interprestasikan sehingga dapat dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban dari informan dengan hasil yang lain, serta dari dokumentasi yang ada. Interpretasi penulisan juga dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak.

3.8 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2014:246) mengemukakan teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Penelitian ini menggunakan tiga kegiatan analisis data yang terdapat dalam model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014:7), yaitu :

3.8.1 Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Dengan demikian akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data

dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2014:247).

3.8.2 Penyajian data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang difahami. (Sugiyono, 2014:249).

3.8.3 Verifikasii data

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal (Sugiyono, 2014:252-253). Peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian untuk ditarik kesimpulan. Peneliti mengolah data yang diperoleh dengan cara mencari makna yang mendalam untuk dijadikan kesimpulan. Peneliti menganalisa data dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahan pada penarikan kesimpulan.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Desa Pahmungan Kabupaten Pesisir Barat

Secara administratif Desa Pahmungan termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Desa Pahmungan terletak pada 5˚ LS dan 103˚ BT dan memiliki ketinggian antara 10-50 mdpl, Desa Pahmungan berjarak 5 km dari pusat Kecamatan (Pasar Krui), 32 km dari Ibukota Kabupaten (Krui), dan dari Ibukota Provinsi (Bandar Lampung) berjarak 287 km. Batas-batas administratif Desa Pahmungan diantaranya bagian utara berbatasan dengan Desa Way Ngison Balak, bagian selatan berbatasan dengan Desa Way Mahnai Lunik, bagian barat berbatasan dengan Desa Sukanegara dan Desa Bumi Waras dan bagian timur berbatasan dengan Hutan Kawasan dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (profil Desa Pahmungan, 2013).

Desa Pahmungan memiliki tipe tanah yang subur berbukit dan diapit oleh dua aliran sungai, yaitu Way Ngison Balak dan Way Ngison Lunik. Masyarakat Desa Pahmungan menggunakan areal datar sebagai daerah persawahan dan pemukiman, sedangkan areal lereng atau dengan topografi curam digunakan sebagai lahan repong damar (agroforest damar). Berikut adalah tabel sebaran penggunaan lahan masyarakat Desa Pahmungan.

Tabel 4. Sebaran Penggunaan Lahan Masyarakat

No	Penggunaan lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Permukiman penduduk	25	0,96
2	Hutan lindung	500	19,23
3	Perkebunan	900	34,62
4	Sawah semi teknis	40	1,54
5	Perbukitan/pegunungan	800	30,77
6	Lain-lain	335	12,88
	Jumlah	2600	100,00

Sumber: Profil Desa Pahmungan, 2019

Jenis tanah yang dimiliki Desa Pahmungan umumnya Podsolik (tanah lembab) merah kuning (PMK) dengan curah hujan berkisar 3.000 – 3.500 mm pertahun. Desa Pahmungan sudah sejak lama identik dengan pohon damar yang sampai saat ini sudah menjadi salah satu daya tarik serta *icon* untuk Desa Pahmungan. Kebun damar atau yang biasa disebut Repong Damar merupakan salah satu bentuk agroforestri. Kawasan agroforesti damar dikatakan ciri khas (*icon*) Desa Pahmungan atau lebih luas lagi di Kecamatan Pesisir Tengah disebabkan karena pertumbuhan pohon damar di wilayah tersebut sangat mendominasi dari tumbuhan lainnya (Foresta, 2000:16).

4.2 Potensi dan Daya Tarik Objek Ekowisata Desa Pahmungan

Desa Pahmungan memiliki potensi-potensi wisata alam yang cukup banyak dan menarik untuk dikelola serta dikembangkan sebagai salah satu destinasi ekowisata. Potensi ekowisata di Desa Pahmungan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi wisata alam, wisata budaya, dan wisata edukasi. Hal tersebut sejalan dengan Hadiwijoyo (2012) bahwa daya tarik wisata adalah suatu bentukan yang menjadi ciri khas ataupun fasilitas yang saling

berhubungan yang dapat menarik minat wisatawan maupun pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu.

Beberapa objek dan daya tarik wisata yang berpotensi dikembangkan dan dapat dikelompokkan menjadi wisata alam maupun wisata budaya. Potensi wisata tersebut yaitu:

a. Air Terjun Tapus
b. Goa Buyung
c. Goa Ihron
d. Goa Tenuk
e. Repong Damar

Berdasarkan dari hasil survei dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis serta wawancara langsung dengan masyarakat setempat, saat ini kebanyakan yang datang mengunjungi Desa Pahmungan merupakan kalangan remaja dan dewasa bahkan juga beberapa mahasiswa yang akan melakukan penelitian. Jika dilihat dari potensi wisata yang ada maka destinasi wisata yang ada di Desa Pahmungan memang sangat cocok untuk kalangan remaja dan dewasa yang suka dengan wisata eksplorasi seperti pendakian, air terjun maupun eksplorasi goa.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

a. Indikator Kerjasama *(Bargaining)* oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam pengembangan kawasan objek wisata di Desa Pahmongan Kabupaten Pesisir Barat dalam hal kerjasama antara pihak pemerintah dan masyarakat disini dapat dilihat dalam proses pelestarian hutan damar seperti kawasan pembibitan dan penanaman yang turut melibatkan langsung antara Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup serta masyarakat sekitar seperti menanam sampai kegiatan kerja bakti bersama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan hutan damar ini. Tetapi dalam hal penurunan harga getah damar masih bisa ditoleransi masyarakat dengan mengembangkan wisata *Repong* damar agar meningkatkan wisatawan yang berkunjung sehingga terciptanya pendapatan desa maupun masyarakat.

b. Indikator persuasif oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam iklan/publikasi wisata *Repong* damar Pesisir Barat oleh agen Traveloka Adventurrose.com, Pesona Indonesia, Traveloka dan Pesona Indonesia dalam promosi dan pengembangan kawasan hutan wisata damar dapat memberikan support agar menarik minat wisatawan dari luar daerah maupun mancanegara guna memasimalkan pengembangan hutan wisata damar agar sesuai visi, misi dan tujuan dari pengembangannya. Dari sisi kesiapan masyarakat setempat, masih perlu dukungan pelatihan kepariwisataan, kelembagaan dan manajemen agar dapat

semakin paham mengelola suatu area ekowisata yang sehat, yang seimbang antar perwujudan kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Indikator pengarahan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat saat ini telah melakukan suatu tindakan dengan mengeluarkan surat edaran dengan No:552/366a/III.11/2015 terkait himbauan untuk melestarikan tanaman rakyat pohon damar. Terkait upaya melahirkan sebuah produk kebijakan Pelestarian *Repong* damar di Kabupaten Pesisir Barat Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sendiri telah mengusulkan kepada DPRD Kabupaten Pesisir Barat untuk dibahas dalam prolegda (program legislasi daerah) di tahun 2021.

6.2. Saran

a. Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat harus mampu menjaga keberlanjutan usahanya serta terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya pelestaraian *Repong* damar dengan tetap menjaga kredibilitas dan tetap menomorsatukan kepentingan rakyat serta tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Seharusnya masyarakat lebih intens dilibatkan dalam setiap kegiatan ataupun program-program riil lainnya.

b. Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam proses perumusan kebijakan pelestarian *Repong* damar di Kabupaten Pesisir Barat, sebaiknya isu kebijakan harga getah damar di Kabupaten Pesisir Barat dapat segera dibentuk formulanya, karena dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat serta melibatkan aktif masyarakat dalam segala proses kebijakannya dengan tujuan menguntungkan kepentingan publik. Selain itu mampu mengatasi dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang.

c. Pembentukan pengelola kawasan wisata dengan tetap melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali agar lebih memudahkan dalam manajemen pengelolaan serta pengembangan kawasan wisata sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan

DAFTAR PUSTAKA

Awang, S.A., 2018. *Politik Kehutanan Masyarakat* Center for Critical Social Studies dan Kreasi Wacana. Yogyakarta.

Dunn, William N 2016. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* . Yogyakarta: *Formulasi Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus Kebijakan Relokasi Tambak*

Firmansyah, Anang, Mahardika, Budi. 2018. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish

Galudra, G., Buana, Y dan Khususiyah, N., 2019. *Mau Melangkah ke Mana Pengelolaan Hutan Sesaot?* Brief No. 09 Policy Analysis Unit. World Agroforestry Center. Bogor. Hanindita Graha Widya.

Islamy, M.Irfan. 2014. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksana-an Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.Nostrand Reinhold Company.

Muhlis Madani, 2018. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan*

Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Ni'matul Huda. 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit Nusa Media, Bandung,

Parsons, Wayne. 2012. Public Policy. Cheltenham : Edward Elgar *Pemerintahan Daerah Yang Efektif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.Press, Yogyakarta, 2010. Pustaka Utama.

Pritasari, L. A., & Kusumasari, B. 2019. *Intervensi Aktor dalam Mempengaruhi*

S. F Marbun. 2013. *Hukum Administrasi Negara II*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta,

Sanudin, Awang, S.A., Sadono, R dan Purwanto, RH., 2018. *Perkembangan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung. Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 23(2):276-283

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta. *Udang di Yogyakarta*. Jurnal Borneo Administrator, 15(2), 179-198.

Victor M. Situmarang dan Jusuf Juhir. 2016. *Aspek Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta:Op.cit.

Widarta. 2001. *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Lapera Pustaka